

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Indonesia

Susanti^a, Sunarto Wage^b, Syahril Effendi^c

^{ab}Program Studi Manajemen Universitas Putera Batam, Batam - Kepri

^bProgram Studi Akuntansi Universitas Putera Batam, Batam – Kepri

pb210910016@puterabatam.ac.id, nartowage2009@gmail.com, syahril@puterabatam.ac.id

Abstract

This research aims to analyze and find out how much influence regional original income (PAD) and balancing funds have on regional expenditure in Indonesia. Research data comes from the Central Statistics Agency in 34 Provinces in Indonesia for the period 2018 - 2021 with 136 data. After data collection, there were several provinces in Indonesia whose data were incomplete so the data used was 100. The provinces with incomplete data were: Bengkulu, Bali, South Kalimantan, Central Kalimantan, West Nusa Tenggara, South Sulawesi, West Sulawesi, Main Maluku and West Papua. Data analysis techniques use (1) Classic assumption tests, namely normality, heteroscedasticity, multicollinearity and autocorrelation tests, (2) Multiple linear regression analysis, t test, F test and coefficient of determination. The results of the research show that partially original regional income has no effect on regional spending in Indonesia, balancing funds have no effect on regional spending in Indonesia, and simultaneously original regional income and balancing funds have no effect on regional spending in Indonesia.

Keywords: Original Regional Income (PAD), Balancing Fund, Regional Expenditure.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap Belanja Daerah di Indonesia. Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik di 34 Provinsi di Indonesia periode 2018 – 2021 dengan data sebanyak 136. Setelah dilakukan pengumpulan data, ada beberapa Prpvinsi di Indonesia datanya tidak lengkap sehingga data yang digunakan sebanyak 100. Adapun Provinsi yang datanya tidak lengkap adalah Provinsi : Bengkulu, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utama, dan Papua Barat. Teknik analisis data menggunakan (1) Uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi, (2) Analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Indonesia, dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Indonesia, dan secara simultasi pendapatana asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Indonesia.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah.

1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dana perimbangan secara rata-rata didaerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80 persen dari penerimaan daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan

terjadinya defisit. Untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat menstransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun.

Kebijakan otonomi daerah sudah diimplementasikan hampir 20 tahun. Otonomi daerah sudah dimulai sejak adanya paket undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menjadi aturan yang mengatur otonomi daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memasuki babak baru dalam sistem pengelolaan pemerintahan. Perjalanan implementasi sistem otonomi daerah ditandai dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal. Hal tersebut merubah sebagian besar aspek pengelolaan keuangan negara, terutama keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian agar lebih fokus, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Apakah pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Indonesia ?
- b) Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Indonesia ?
- c) Apakah pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Indonesia ?

2. Kajian Pustaka

A. Belanja Daerah

Menurut Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 "belanja daerah yaitu pengeluaran pemerintah Daerah yang berdasarkan kas dan tahun anggaran periodenya menjadi beban daerah". Undang-undang No. 23 tahun 2002 "belanja daerah diartikan faktor yang mempengaruhi pengurangan nilai kekayaan pada tahun anggaran termasuk dalam kewajiban pemerintah daerah" (Nailufar & Sufitrayati, 2019) dalam Joni Fernandes dan Lovita Fauzia (2022). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) dalam Joni Fernandes dan Lovita Fauzia (2022).

Belanja daerah dapat diartikan sebagai seluruh pengeluaran bendahara umum/daerah yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan pengeluaran ini tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah (Nordriawan, dkk, 2012) dalam Nabiyatun Nur Fatimah et al, (2019).

Menurut Mahmudi (2010) dalam Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) Belanja daerah dipisahkan dua bentuk yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi yang hakekatnya merupakan biaya (*expense*) untuk membiayai kegiatan non investasi yang memiliki kegunaan kurang dari 1 tahun, berbeda halnya dengan Belanja Modal dalam pengertiannya merupakan belanja investasi berupa biaya sehingga diakui neraca.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja pemerintah daerah diklasifikasikan berdasarkan dua jenis belanja yaitu":

- a) Belanja Tidak Langsung.
- b) Belanja Langsung

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Bratakusumah dan Solihin (2002) dalam Hustianto Sudarwadi (2015:447) adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Definisi PAD yang dikemukakan Carunia (2017) dalam M.Agung, *at al* (2022:743) ialah perolehan pendapatan oleh suatu daerah dalam mengelola kekayaan-kekayaan yang terdapat pada daerah yang diduduki tersebut.

Menurut Siregar (2017) dalam Iqlima Azhar (2021:166) ,Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) diterangkan dalam penjelasan undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa daerah telah di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga masing-masing daerah berupaya untuk meningkatkan secara optimal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Ang Sandera Widjajakoesoema, 2011).

Hasil penelitian Joni Fernandes dan Lovita Fauzia (2022) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat 2017-2020. Hasil penelitian Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono, (2019) Bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian Ade Pipit Fatmawati dan Nabilla Ria Sari, (2021) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah penelitian di lakukan di Pemerintah kota di Pulau Jawa. Hasil penelitian Muhammad Iqbal, Tarmizi Abbas, dan Ratna (2020) bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian Ardita Tri Handayani, Tri Suryati, et al (2022) bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil penelitian Sari Rusmita (2016) menjelaskan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017) bahwa Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bandung. Hasil penelitian Ang Sandera Widjajakoesoema (2011) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri terhadap Belanja Daerah Kota Kediri. Pendapatan Asli Daerah berasal dari : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Daerah, (4) Lain-lain PAD yang sah.

C. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang diperoleh daerah dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pemerataan pembangunan daerah (Suryana, 2018) (Asmawati, Saragih, Panjaitan, & Kumala, 2019) (Eve Ida Malau dan Calen, *et al*, (2020). Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Andirfa, Basri, & A.Majid, 2016) (Rizal & Erpita, 2019). Alokasi dana perimbangan digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Mawarni & Abdullah, 2013) (Yunus, Sianipar, Saragih, & Amelia, 2019) (Calen, Agustian, Damanik, & Tannuary, 2019) (Arwin & Hutagalung, 2019) (Eve Ida Malau dan Calen, *et al*, (2020).

Hasil penelitian Ardita Tri Handayani, Tri Suryati, et al (2022) bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017) bahwa Dana Perimbang daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bandung.

Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai konsep-konsep yang dapat dinilai benar atau salah untuk diujikan secara empiris. Hipotesis bersifat praduga sementara dalam arti kata dapat ditolak berdasarkan hasil pengujian data. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

H1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Indonesia.

H2 = Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Indonesia.

H3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Indonesia.

3. Metode Penelitian

A. Desain Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang

lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik, maka peneliti bukan hanya mengetahui aturan permainan, tetapi juga harus mempunyai keterampilan-keterampilan dalam melaksanakan penelitian. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian, yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan penelitian yang dikerjakan.

Desain penelitian merupakan suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisis terakhir.

Desain penelitian ini dilakukan sesuai dengan permasalahan yang ada pada latarbelakang dan ketentuan dalam rumusan masalah yaitu untuk mengkaji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Indonesia, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif, menurut (Sugiyono, 2016) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dalam penelitian yang akan dianalisis dengan menggunakan ukuran-ukuran statistik yang relevan atas data tersebut untuk menguji hipotesis.

Dalam metode ini akan diamati secara seksama aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data skunder yang menunjang penyusunan laporan penelitian ini. Data-data yang diperoleh selama penelitian ini akan diolah, dianalisis, dengan teori-teori yang telah dipelajari sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti dan dari gambaran objek tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia.. Alat untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan *Microsoft Excel 2010* dan *Statistical Package For The Social Science (SPSS)*.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah 34 Provinsi di Indonesia. Sampel adalah bagian atau jumlah karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu.

C. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Setelah menentukan berbagai konsep dan teori tertentu, peneliti perlu menentukan *variable* penelitian dan selanjutnya merumuskan hipotesis berdasarkan hubungan antar variabel.

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan perimbangan terhadap belanja daerah di Indonesia, terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (Independen) dan *variable* terikat (dependen). Penjelasan lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel ini sering disebut variabel stimulus atau *antecedent*. Namun dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Adapun yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Dalam mengelola pendapatan, daerah mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan yang berbeda. Oleh karena itu pemerintah pusat menanganinya dengan mengalokasikan dana yang berasal dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah.

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pendapatan APBN. Dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada daerah otonom. Tujuan pemberian dana perimbangan adalah agar daerah bisa mencukupi kebutuhan aktivitas dan program desentralisasi di sana. Untuk besaran dana perimbangan sendiri akan diatur di setiap tahun anggaran. Dana yang satu ini dialokasikan berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis dana perimbangan sendiri dibagi menjadi tiga jenis: Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

b. Variabel Terikat (Belanja Daerah)

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

D. Regresi Linier Berganda

Metode regresi berganda adalah model regresi yang melibatkan satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas (Sujarweni, 2016). Untuk mengukur hipotesis akan digunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Belanja Daerah
- a = Konstanta
- b_{1,2,3} = Koefisien Regresi
- Independen
- X₁ = Pendapatan asli daerah (PAD)
- X₂ = Dana Perimbangan
- e = Error

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

a. Hasil Uji T

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji t dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Hasil Uji T

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	66703991390.8	15150689163		.440	.661
		43	3.531			
	Pendapatan Asli Daerah	-5.449	17.156	-.064	-.318	.751
	Dana Perimbangan	12.059	37.196	.065	.324	.746

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2$$

$$Y = 66703991390.843 + (-5.449) + 12.059$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (Belanja Daerah di Indonesia)

bo = konstanta

X₁ = variabel independen (Pendapatan Asli Daerah/PAD)

X₂=variabel independen (Dana Perimbangan)

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Indonesia.

Hasil analisis seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki koefisien regresi sebesar -5.449 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.751. Nilai signifikansi uji t yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif yang signifikan variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Indonesia.

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Indonesia.

Hasil analisis seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 terlihat bahwa variabel Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar 12.059 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.467. Nilai signifikansi uji t yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Indonesia.

b. Hasil Uji F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Berikut ini hasil uji statistik F dapat ditunjukkan pada Tabel 2

Tabel 2: Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	d f	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	85026396926051620000000.000		42513198463025810000000.000	.055	.946 ^b
Residual	74496194354193010000000000.0	00	768002003651474400000000.00		
Total	74581220751119065000000000.0	00			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji F di atas, diketahui nilai F hitung sebesar 0.055 dengan tingkat signifikansi 0.946 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah di Indonesia.

c. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.034 ^a	.001	-.019	876357235179.50960

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 3 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* (*Adjusted R²*) sebesar -0,019 atau sebesar -0,019 %. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah di Indonesia dapat dijelaskan atau dipengaruhi hanya -0,019% oleh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2) sedangkan sisanya 0.981% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

B. Pembahasan

Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai konsep-konsep yang dapat dinilai benar atau salah untuk diujikan secara empiris. Hipotesis bersifat praduga sementara dalam arti kata dapat ditolak berdasarkan hasil pengujian data. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Daerah di Indonesia.** Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki koefisien regresi sebesar -5.449 dengan

nilai signifikansi uji t sebesar 0.751. Nilai signifikansi uji t yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif yang signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Rusmita (2016); Ardita Tri Handayani, Tri Suryati, Hera Ayuk Marsela, Dani Luqmana, & Saiful Anwar (2022). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh : Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017); Joni Fernandes dan Lovita Fauzia (2022); Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono (2019); Ade Pipit Fatmawati dan Nabilla Ria Sari (2021); Muhammad Iqbal, Tarmizi Abbas, dan Ratna (2020).

b) **Pengaruh Dana Perimbangan (X_2) terhadap Belanja Daerah di Indonesia.** Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar 12.059 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.467. Nilai signifikansi uji t yang lebih besar dari 0,05

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono (2019); Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017).

- c) **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Daerah di Indonesia.** Berdasarkan hasil uji F diketahui nilai F hitung sebesar 0.055 dengan tingkat signifikansi 0.946 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono (2019); Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017).

5. Kesimpulan Dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dari bab sebelumnya maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah memiliki koefisien regresi sebesar -5.449 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.751. Nilai signifikansi uji t yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif yang signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Indonesia.
- Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar 12.059 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0.467. Nilai signifikansi uji t yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Indonesia.
- Hasil uji F di atas, diketahui nilai F hitung sebesar 0.055 dengan tingkat signifikansi 0.946 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah di Indonesia.
- Nilai *Adjusted R Square (Adjusted R²)* sebesar -0,019 atau sebesar -0,019 %. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah di Indonesia dapat dijelaskan atau dipengaruhi hanya -

0,019% oleh Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Perimbangan (X₂) sedangkan sisanya 0.981% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan penulishadalah sebagai berikut:

- Pemerintah daerah disaran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga Belanja Daerah bisa di tingkatkan.
- Pemerintah daerah diharapkan untuk bisa menggunakan Dana Perimbangan untuk pembangunan daerah secara maksimal.
- Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lainnya yang mempengaruhi belanja daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ade Pipit Fatmawati dan Nabilla Ria Sari (2021), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota di Pulau Jawa. LAND JOURNAL. Volume 2, Nomor 1, Januari 2021
- Ardita Tri Handayani, Tri Suryati, Hera Ayuk Marsela, Dani Luqmana, & Saiful Anwar (2022), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. Volume 17, Nomor 1, April 2022:.
- Ang Sandera Widjakoesoema (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri. Cahaya Aktiva Vol.01 No.01, September 2011.
- Ari Nurul Fatimah (2020) Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. JAAF (*Journal of Applied Accounting and Finance*) Volume 4, Number 2, 2020, 75-92
- Eve Ida Malau dan Calen, *et all*, (2020), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Riset & Jurnal Akuntansi. Volume 4 Nomor 1, Februari 2020.
- Hustianto Sudarwadi (2015), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014). Seminar

- Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. SNEMA - 2015.
- Joni Fernandes dan Lovita Fauzia (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2017-2020. *Jurnal Revenue -Jurnal akuntansi*. Vol. 3, No. 1, Juni 2022.
- Iqlima Azhar, (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*. Volume 11 Nomor 02 Tahun 2021.
- Nabiyatun Nur Fatimah1, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *EQUITY*, Vol. 22, No.2, 2019, 197-214.
- M. Agung Satria, Jacksen Kosasih, Yansyahputra Sivil Gulo, Wenny Anggresia, dan Ginting (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Kota/Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019). *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 6 No. 2, 2022.
- Muhammad Iqbal, Tarmizi Abbas, dan Ratna (2020), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Volume 03 Nomor 3 Desember 2020.
- Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281.
- Masayu Rahma Wati Dan Catur Martian Fajar (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1, (1), 2017,
- Mulia Andirfa, Hasan Basri, dan M.Shabri A.Majid (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*.
- Sari Rusmita (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 2016, Vol. 5, No. 3, 237 – 257.
- Sugiyono, D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Penelitian Akuntansi Dengan SPSS*. (Mona, Ed.). Yogyakarta
- Iseu Anggareni, Dani Rachman, dan Deuis Karlimat (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2010-2019. *Akurat |Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Volume 13, Nomor 1, Hlm 27-37.